

**Catatan atas Laporan
Keuangan Audited
Tahun Anggaran 2021
Tingkat Satuan Kerja**



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, April 2022

Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf S.Si., M.A

NIP. 19700527 199803 1 001

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	55
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	69
F. Pengungkapan Lainnya	77
VI. Lampiran dan Daftar	82

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, April 2022

Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A

NP. 19700527 199803 1 001

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp157.990.056. Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.063.086.254 atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp40.274.208.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.692.629.143; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp591.237.411; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.894.743.192; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp206.648.540. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp19.886.384 dan Rp3.672.742.759.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp38.955.859.101 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp38.955.859.100. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp217.080.052 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp38.738.779.048.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.792.453.400 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.38.738.779.048 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp28.349.824.137 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.672.742.759.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA. 2021		% thd Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	157.990.056	-
Jumlah Pendapatan		-	157.990.056	-
Belanja	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	8.399.910.000	8.005.798.797	95
Belanja Barang	B.4	31.757.298.000	29.940.797.459	94
Belanja Modal	B.5	117.000.000	116.489.998	100
Jumlah Belanja		40.274.208.000	38.063.086.254	95

II. NERACA

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	0	18.408.018.433
Belanja dibayar di muka (Prepaid)	C.2	159.000.000	159.000.000
Bagian Lancar tagihan tuntutan perbendaharaan /tuntutan Ganti Rugi	C.3	416.369.509	0
Penyisihan Piutang tidak tertagih – bagian lancar Tagihan tuntutan perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi	C.4	(2.081.848)	0
Bagian Lancar tagihan tuntutan perbendaharaan /tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.5	414.287.661	0
Persediaan	C.6	17.949.750	7.662.700
Jumlah Aset Lancar		591.237.411	18.574.681.133
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.7	9.483.257.624	10.136.025.579
Jalan. Irigasi dan Jaringan	C.8	30.500.000	30.500.000
Aset Tetap Lainnya	C.9	199.033.900	199.033.900
Akumulasi Penyusutan	C.10	(6.818.048.332)	(6.068.655.489)
Jumlah Aset Tetap		2.894.743.192	4.296.903.990
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.11	328.919.000	383.244.000
Aset Lain-lain	C.12	872.801.940	429.869.509
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(995.072.400)	(127.837.917)
Jumlah Aset Lainnya		206.648.540	685.275.592
Jumlah Aset		3.692.629.143	23.556.860.715
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	19.886.384	727.008.210
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.15	0	37.399.105
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19.886.384	764.407.315
Jumlah Kewajiban		19.886.384	764.407.315
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	3.672.742.759	22.792.453.400
Jumlah Ekuitas		3.672.742.759	22.792.453.400
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		3.692.629.143	23.556.860.715

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
dan 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1	14.814.707
Jumlah Pendapatan		1	14.814.707
Beban			
Beban Pegawai	D.2	8.008.955.983	7.688.384.986
Beban Persediaan	D.3	31.161.925	126.482.850
Beban Barang dan Jasa	D.4	18.918.607.482	76.768.456.632
Beban Pemeliharaan	D.5	849.492.250	1.959.981.885
Beban Perjalanan Dinas	D.6	9.541.318.148	40.476.594.413
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.604.241.465	1.703.117.299
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	D.8	2.081.848	0
Jumlah Beban		38.955.859.101	128.723.018.065
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(38.955.859.100)	(128.708.203.358)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		217.080.052	95.881.556
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		217.080.052	146.161.466
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	50.279.910
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		217.080.052	97.698.276
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.9	217.080.052	97.698.276
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(38.738.779.048)	(128.610.505.082)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.10	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	D.11	(38.738.779.048)	(128.610.505.08)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
dan 31 DESEMBER 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E.1	22.792.453.400	17.786.811.349
Surplus / Defisit LO	E.2	(38.738.779.048)	(128.610.505.082)
Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	E.3	(8.730.755.730)	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	(12.385.861)	-
Koreksi Lain-Lain	E.3.2	(8.718.369.869)	-
Jumlah		(17.461.511.460)	-
Transaksi Antar Entitas	E.4	28.349.824.137	133.616.147.133
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	E.5	(19.119.710.641)	5.005.642.051
Ekuitas Akhir	E.6	3.672.742.769	22.792.453.400

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

*Dasar
Hukum dan
Profil Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian. yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;
- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software/ Aplikasi</i> Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus

Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Per 31 Desember 2021 telah dilakukan 7 (Tujuh) kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 01 dengan tanggal revisi 3 Juni 2021
2. Revisi ke 02, dengan tanggal revisi 19 Juli 2021
3. Revisi ke 03, dengan tanggal revisi 5 Agustus 2021
4. Revisi ke 04, dengan tanggal revisi 21 September 20
5. Revisi ke 05, dengan tanggal revisi 13 Oktober 2021
6. Revisi ke 06, dengan tanggal revisi 30 November 2021
7. Revisi ke 07, dengan tanggal revisi 28 Desember 2021

Revisi anggaran sesuai Surat Sekretaris Jenderal nomor 0171/SJ/PR.03.01/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penghematan Belanja K/L TA 2021. Efisiensi Belanja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sendiri berasal dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 sebesar Rp139.843.000.

Revisi anggaran ke-4 sesuai surat Sekretaris Jendral nomor 0300/PR.03.00/SJ/08/2021 Perihal Kebutuhan gaji dan Tunjangan (001) serta operasional dan pemeliharaan kantor (002) yakni dalam rangka persiapan Pengusulan kekurangan kebutuhan anggaran tahun 2021 yakni usulan kekurangan kebutuhan anggaran gaji dan dan tunjangan serta honor bagi pelaksana teknis dan tenaga pendukung.

Sedangkan Revisi anggaran ke-7 sesuai dengan surat Nomor 183/KU.00.00/KI/12/2021 kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Perihal Permintaan Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan.

Perubahan tersebut dirincikan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	8.688.460.000	8.399.910.000
Belanja Barang	24.081.991.000	31.757.298.000
Belanja Modal	232.100.000	117.000.000
Jumlah Belanja	33.002.551.000	40.274.208.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp157.990.056*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp157.990.056. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan jasa giro dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	14.716.504	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	143.273.552	-
Jumlah	-	157.990.056	-

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp14.716.504 terdiri dari

Uraian	NTPN	Nominal
Jasa giro APBN Bawaslu Kota Samarinda Agustus-September 2020	1150A61QU7K95F28	Rp 19.591
Jasa giro APBN Bawaslu Kab Berau Agustus-September 2020	782C06U8E26RQC3J	Rp 4.225
Jasa giro APBN Bawaslu Kab Mahakam Ulu Agustus 2020	96CD32G4UTATPAPI	Rp 478

Jasa giro Rekening PDHL Bawaslu Kota Samarinda TA 2020	418046U8E2DDU8HF	Rp 1.883.265
Jasa giro Rekening PDHL Bawaslu Kota Balikpapan TA 2020	8C0580N9V8FK50LI	Rp 5.108.714
Jasa giro Rekening PDHL Bawaslu Kab Mahakam Ulu TA 2020	512A23CIE0FM19SO	Rp 7.700.231
Total		Rp14.716.504

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp143.273.552 terdiri dari setor kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2020 dan pengembalian honorarium Pokja Penyelenggaraan Pilkada TA 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas belanja honor output kegiatan, serta terdapat Pengembalian Perjalanan Dinas TA 2019.

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Supervisi Penanganan Pelanggaran pada tahapan rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Kutai Timur	14/01/2021	8ACC948VUIFON6B0	Rp430.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka memfasilitasi Koordiv Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kaltim a.n. Sukri	14/01/2021	FAE927QLTSPAB7KM	Rp200.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin Supervisi Evaluasi dan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa serta Dinamika a.n. Hari Dermanto	14/01/2021	DF70F48VUIFONBT4	Rp300.000

Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Mendampingi Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kaltim a.n. Syaugi Pratama	14/01/2021	EC5510N9V8673D76	Rp300.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin Rakor Nasional Tim Pemeriksa Daerah dan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta a.n. Hari Dermanto	14/01/2021	1497A1JNF2OJGG7P	Rp600
Kelebihan Pembayaran Perjadin Monitoring Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan di Berau a.n. Arrohman	01/02/2021	896828N3DNC68LU9	Rp168.000
Refund Tiket Pesawat Pulang Undangan Bawaslu RI pada Rakor Nasional Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Malang	10/03/2021	7B0AB2G4UTGS3MM6	Rp1.076.419
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kutai Kartanegara	27/04/2021	B148C2G4UTKAQID6	Rp4.179.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Kutai Timur	27/04/2021	01D583CIEO6N7P63	Rp1.425.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Balikpapan	28/04/2021	695A48N3DNL1LO2L	Rp1.995.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Kutai Barat	29/04/2021	EA0482G4UTKCTND0	Rp5.282.500

Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Paser	29/04/2021	75BC80N9V8FK5FR6	Rp18.995.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Bontang	29/04/2021	2D25A0N9V8FJ1J86	Rp3.942.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Samarinda	29/04/2021	073476U8E2GB1LBN	Rp2.015.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Mahakam Ulu	30/04/2021	CE14E1JNF321MVPG	Rp30.000.000
Pengembalian Honorarium Pokja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Kota Balikpapan TA 2020	30/04/2021	A918C7QLTT2ND1VC	Rp34.800.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Berau	30/04/2021	5D5D72G4UTKD0J32	Rp23.302.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Mahakam Ulu	20/05/2021	A16232G4UTN3KH03	Rp7.150.000
Pengembalian atas terdapatnya biaya taksi Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan metode At Cost namun dibayarkan menggunakan daftar Pengeluaran riil tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada Bawaslu Kota Balikpapan	17/09/2021	6AF9C8N3DO3J4J5F	4.233.000

Pengembalian kelebihan atas pembayaran Perjalanan Dinas yang terdiri dari kelebihan Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi pada Bawaslu Kota Balikpapan	14/09/2021	U8E2UQAH5B4FBD26	978.533
Pengembalian Tahap 1 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Kabupaten Paser	30/12/2021	FCF131JNF3PSKTN9	2.500.000
Total			Rp143.273.552

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 1,141.50% dibandingkan 31 Desember 2020. Kenaikan terjadi dikarenakan pada TA 2021 terdapat Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yaitu pengembalian honorarium pokja Penyelenggaraan Pilkada TA 2020 yang melebihi jumlah maksimal per bulan.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.816.720	100
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	14.716.504	9.751.027	50.92
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	143.273.552	996.866	14,272.40
Jumlah	155.990.056	12.564.613	1.141.50

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara Rp

38.063.086.254

Realisasi Belanja instansi Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.063.086.254 atau 94.56% dari anggaran belanja sebesar Rp40.274.208.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	8.399.910.000	8.005.798.797	95.31
Belanja Barang	31.757.298.000	29.940.797.459	74.11
Belanja Modal	117.000.000	116.489.998	99.56
Total Belanja Kotor	40.274.208.000	38.063.086.254	99.56
Jumlah	40.274.208.000	38.063.086.254	94.56

Dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 69.78% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi atas Penggunaan Dana Hibah Pilkada serentak 2020 tahun anggaran 2021 di mana telah dilakukan cut off per 31 Maret 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja

Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	8.005.798.797	7.688.384.986	4.12
Belanja Barang	29.940.797.459	117.347.789.135	(74.48)
Belanja Modal	116.489.998	941.174.265	(87.56)
Jumlah	38.063.086.254	125.977.348.386	(69.78)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja

Pegawai

Rp8.005.798.797

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.005.798.797 dan Rp7.688.384.986. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai

imbangan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 4.12% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Kenaikan yang signifikan terdapat pada belanja uang makan PNS sebesar 42.21%. Kenaikan disebabkan oleh adanya pembayaran Belanja Uang Makan PNS bagi Bawaslu Kabupaten/Kota.

*Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	857.655.041	588.264.580	45.79
Belanja Uang Kehormatan	6.384.179.100	6.360.462.600	(0.37)
Belanja Uang Makan PNS	159.717.250	112.307.000	42.21
Belanja Tunjangan Khusus / Kegiatan	702.469.656	650.151.806	8.04
Jumlah Belanja Kotor	8.005.798.797	7.688.384.986	4.12
Pengembalian Belanja Pegawai	(178)	(516)	(0.65)
Jumlah Belanja	8.005.798.797	7.688.384.986	4.12

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.005.798.797 dipergunakan untuk

1. Pembayaran gaji PNS bulan Januari s.d. Desember 2021;
2. Pembayaran tunjangan struktural bulan Januari s.d. Desember 2021;
3. Pembayaran uang makan PNS bulan Januari s.d. Desember 2021;
4. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d. Desember 2021;
5. Pembayaran tunjangan kinerja PNS bulan Januari s.d. Desember 2021;
6. Pembayaran THR dan Gaji 13 PNS Tahun 2021;
7. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2021;
8. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi tahun 2021.

Realisasi Belanja **B.4 Belanja Barang**

Barang

Rp29.940.797.459

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.940.797.459 dan Rp117.347.789.135. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2021 mengalami Penurunan sebesar 72.59 % dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan adanya penurunan realisasi atas Penggunaan Dana Hibah Pilkada serentak 2020 tahun anggaran 2021 di mana telah dilakukan cut off per 31 Maret 2021.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	14.176.255.398	45.850.882.494	(69.08)
Belanja Barang Non Operasional	1.123.938.166	13.909.509.648	(91.91)
Belanja Barang Persediaan	41.448.975	148.138.900	(72.02)
Belanja Jasa	3.975.257.580	15.235.768.737	(73.90)
Belanja Pemeliharaan	849.492.250	1.959.981.885	(56.65)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9.774.405.090	40.243.507.471	(75.71)
Jumlah Belanja Kotor	29.962.575.759	117.356.265.135	(74.46)
Pengembalian Belanja	(21.778.300)	(8.476.000)	156.94
Jumlah Belanja	29.940.797.459	117.347.789.135	(72.59)

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.940.797.459 dipergunakan untuk

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kaltim;
2. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan dan BMN;
3. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
5. Koordinasi pengawasan tahapan pemilu/pemilihan;
6. Supervisi monitoring/pengawasan;
7. Fasilitasi, koordinasi dan pelaporan Bawaslu Provinsi;
8. Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran;
9. Supervisi/monitoring penanganan pelanggaran;

10. Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan;
11. Supervisi/monitoring penyelesaian sengketa;
12. Pengelolaan kehumasan. peliputan dan dokumentasi;
13. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik;

Dari realisasi belanja barang sebesar Rp29.940.797.459 terdapat realisasi belanja barang yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp330.377.000 yang dipergunakan untuk

1. Pengadaan masker/*hand sanitizer* untuk kegiatan maupun persediaan;
2. Biaya penyemprotan disinfektan di area kantor;
3. Pembayaran lisensi aplikasi *video conference* s.d. Desember 2021;
4. Biaya paket data komunikasi s.d. Desember 2021.

Per 31 Desember 2021. realisasi akun khusus belanja atas dampak dan penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut

Realisasi Akun Khusus Belanja Covid-19

Per 31 Desember 2021

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	285.500.000	253.712.000	88.86
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	16.200.000	16.200.000	100
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	14.375.000	11.715.000	81.49
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi	76.430.000	48.750.000	63.78
Jumlah		392.505.000	330.377.000	80.04

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20.385.525.398 dan Rp27.875.250.495. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	11.226.228.105	15.373.578.894	(26.98)
Belanja Barang Non Operasional	348.063.717	642.778.305	(45.85)
Belanja Barang Persediaan	41.448.975	148.138.900	(72.02)
Belanja Jasa	3.448.829.600	5.012.045.766	(31.19)
Belanja Pemeliharaan	779.029.425	1.274.340.530	(38.87)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.563.703.876	5.432.844.100	(16.00)
Jumlah Belanja Kotor	20.407.303.698	27.883.726.495	(26.81)
Pengembalian Belanja	(21.778.300)	(8.476.000)	156.94
Jumlah Belanja	20.385.525.398	27.875.250.495	(26.87)

Realisasi belanja barang dipergunakan untuk

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kaltim;
2. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan dan BMN;
3. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
5. Koordinasi pengawasan tahapan pemilu/pemilihan;
6. Supervisi monitoring/pengawasan;
7. Fasilitasi, koordinasi dan pelaporan Bawaslu Provinsi;
8. Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran;
9. Supervisi/monitoring penanganan pelanggaran;
10. Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan;
11. Supervisi/monitoring penyelesaian sengketa;
12. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi;

13. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik;

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.555.272.061 dan Rp89.472.538.640.

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 30 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.954.502.293	30.485.779.600	(90.31)
Belanja Barang Non Operasional	775.874.449	13.266.731.343	(94.15)
Belanja Jasa	526.427.980	10.223.722.971	(94.85)
Belanja Pemeliharaan	70.462.825	685.641.355	(89.72)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.228.004.514	34.810.663.371	(84.98)
Jumlah Belanja	9.555.272.061	89.472.538.640	(89.32)

Realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp9.555.272.061 merupakan realisasi lanjutan atas sisa Hibah Pilkada 2020 yang terdiri dari honorarium pengawas pemilihan kepala daerah, honorarium kesekretariatan, honorarium pengelola keuangan, pemeliharaan/BBM kendaraan operasional, pelayanan administrasi perkantoran, rapat kerja/rapat koordinasi/rapat kerja teknik pengawasan, koordinasi dengan stakeholder, perjalanan dinas kabupaten/kota dalam rangka penyelesaian sisa dana Hibah Pilkada 2021.

Realisasi

Belanja Modal

Rp116.489.998

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp116.489.998 dan Rp941.174.265. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 87.62% dibandingkan dengan 31 Desember

2020. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk akun belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 30 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.489.998	713.370.265	(83.67)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal. Jalan. Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	227.804.000	(100)
Jumlah Belanja Kotor	116.489.998	941.174.265	(87.62)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	116.489.998	941.174.265	(69.78)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp116.489.998 dan Rp713.370.265 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 83.67% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk akun belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.489.998	713.370.265	(83.67)
Jumlah Belanja	116.489.998	713.370.265	(83.67)

Pembelian Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut

*Tabel Mutasi Pembelian
Peralatan dan Mesin TA 2021*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan
3.05.01.05	Lcd Projector/Infocus	1	Rp 6.500.000
3.05.01.05	Focusing Screen	2	Rp 5.000.000
3.05.02.01	Kursi Besi/Metal	25	Rp 15.000.013
3.05.02.01	Meja Rapat	15	Rp 36.999.987
3.05.02.04	Ac. Split	2	Rp 11.990.000
3.10.01.02	P.C Unit	2	Rp 16.000.000
3.10.02.03	Printer	6	Rp 14.999.998
3.10.02.00	Scanner	1	Rp 10.000.000
Total			Rp 116.489.998

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp227.804.000 Realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	-	227.804.000	(100)
Jumlah Belanja	-	227.804.000	(100)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp18.408.018.433. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas lainnya dan setara kas ini terdiri dari

Keterangan	31 Des 2021	31 Des 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp0	Rp0
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	Rp0	Rp18.408.018.433
Total	Rp0	Rp18.408.018.433

Pada tahun 2021 telah dilakukan pengesahan hibah langsung atas penggunaan dana hibah Pilkada TA 2020 untuk periode Januari s.d. Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi / Kabupaten / Kota)	Nominal Pengesahan	Tanggal SP2D
Bawaslu Kabupaten Berau	Rp 1.055.230.763	28-Jul-2021
Bawaslu Kota Bontang	Rp 432.191.785	27-Jul-2021
Bawaslu Kab. Kutai Barat	Rp 1.129.359.764	26-Jul-2021
Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	Rp 1.594.031.653	26-Jul-2021
Bawaslu Kab. Kutai Timur	Rp 1.393.246.555	29-Jul-2021
Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Rp 1.053.389.436	02-Aug-2021
Bawaslu Kab. Paser	Rp 805.984.847	26-Jul-2021
Bawaslu Kota Samarinda	Rp 671.727.232	26-Jul-2021
Total	Rp 8.135.162.035	

Cut off penggunaan dana hibah adalah di bulan Maret 2021, dan telah dilakukan pengembalian sisa dana hibah ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi / Kabupaten / Kota)	Nominal Pengembalian	Tanggal Setor
Bawaslu Kota Balikpapan	Rp 1.110.653.962	24-May-21
Bawaslu Kab. Berau	Rp 386.645.916	06-Apr-21
Bawaslu Kota Bontang	Rp 612.136.950	26-Mar-21
Bawaslu Kab. Kutai Barat	Rp 282.869.292	31-Mar-21
Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	Rp 1.754.174.880	07-Apr-21
Bawaslu Kab. Kutai Timur	Rp 1.483.593.243	01-Apr-21
Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Rp 19.089.651	05-Apr-21
Bawaslu Kab. Paser	Rp 1.256.852.702	29-Mar-21
Bawaslu Kota Samarinda	Rp 1.794.501.706	01-Apr-21
Total	Rp 8.700.518.312	

*Belanja
Dibayar Di
Muka (Prepaid)
Rp159.000.000*

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp159.000.000 dan Rp159.000.000, merupakan Beban Sewa Gedung Bawaslu Kota Balikpapan untuk 1 (satu) Tahun terhitung dari 10 Juli 2021 s.d. 10 Juli 2022.

*TP/TGR
Rp416.369.509*

C.3 Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp416.369.509 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut merupakan temuan sisa dana hibah Pilkada serentak tahun 2015 yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda per 31 Desember 2021 senilai Rp416.369.509.

*Penyisihan
Piutang -
TP/TGR*

(Rp2.081.848)

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.081.848.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang

*TP/TGR (Netto)
Rp414.287.661*

C.5 Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp414.287.661

Piutang tagihan TP adalah Piutang yang timbul dari akibat tuntutan yang dikenakan Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. TP dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan. Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) sebesar Rp414.287.661 merupakan hasil dari nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp416.369.509 dikurangi nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp2.081.848.

*Persediaan**Rp17.949.750***C.6 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp17.949.750 dan Rp7.662.700.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	15.577.750	7.662.700
Persediaan Lainnya	2.372.000	-
Jumlah	17.949.750	7.662.700

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari

- a. Alat Tulis seharga Rp1.570.475;
- b. Penjepit Kertas seharga Rp179.250;
- c. Penghapus/Korektor Rp30.000;
- d. Ordner dan Map; Rp668.425;
- e. Cutter Rp196.500;
- f. Alat Perekat Rp.639.650;
- g. Staples Rp.314.250;
- h. Isi Staples seharga Rp78.750;
- i. Alat Tulis Kantor lainnya Rp.161.900;
- j. Kertas HVS seharga Rp.5.672.775;
- k. Berbagai Kertas seharga RP1.058.050;
- l. Kertas Cover seharga Rp41.300;
- m. Amplop seharga Rp316.825;
- n. Kertas dan Cover lainnya seharga Rp600.000;
- o. Tinta / toner printer seharga Rp1.869.250;

- p. Mouse seharga Rp987.900;
- q. Batu Batrai seharga Rp.319.550;
- r. Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp872.900;
- s. Obat Lainnya (Persediaan Lainnya) seharga Rp2.372.000;

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Jan 2021	7.662.700
Mutasi Tambah	
Pembelian – Barang Konsumsi	29.733.975
Pembelian – Persediaan Lainnya	11.715.000
Mutasi Kurang	
Pemakaian – Barang Konsumsi	21.818.925
Pemakaian – Persediaan Lainnya	9.343.000
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	17.949.750

*Peralatan dan
Mesin
Rp9.483.257.624*

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp9.483.257.624 dan Rp10.136.025.579. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Jan 2021	10.136.025.579
Mutasi Tambah	
Pembelian	101.489.985
Perolehan Lainnya	64.219.000
Reklasifikasi Masuk	429.650.000
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi Keluar	(429.650.000)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(818.476.940)
Saldo Per 31 Desember 2021	9.483.257.624
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(6.806.896.248)
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	2.676.361.376

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa pembelian. terdiri atas

*Tabel Mutasi Pembelian
Peralatan dan Mesin TA 2021*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan
3.05.01.05	Lcd Projector/Infocus	1	Rp 6.500.000
3.05.01.05	Focusing Screen	2	Rp 5.000.000
3.05.02.01	Meja Rapat	15	Rp 36.999.987

3.05.02.04	Ac. Split	2	Rp 11.990.000
3.10.01.02	P.C Unit	2	Rp 16.000.000
3.10.02.03	Printer	6	Rp 14.999.998
3.10.02.00	Scanner	1	Rp 10.000.000
Total			Rp 101.489.985

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa perolehan lainnya yaitu *reward* Bank Muamalat untuk Bawaslu Kutai Timur, terdiri atas

*Tabel Mutasi Perolehan Lainnya
Peralatan dan Mesin TA 2021*

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan	Keterangan
3.05.02.01	Sice	Rp 15.000.000	<i>Reward</i> Bank Muamalat untuk Bawaslu Kutai Timur
3.05.02.04	Kipas Angin	Rp 5.295.000	
3.05.02.06	Televisi	Rp 7.000.000	
3.10.01.02	PC Unit	Rp 10.000.000	
3.10.02.03	Printer	Rp 4.000.000	
3.05.01.05	Papan Pengumuman	Rp 5.500.000	
3.05.02.06	Neon Box	Rp 2.750.000	
3.06.01.02	Camera Conference	Rp 3.250.000	
3.05.01.04	Lemari Besi / Metal	Rp 11.424.000	
Total		Rp 64.219.000	

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa reklasifikasi masuk, terdiri atas

*Tabel Mutasi Reklasifikasi Masuk
Peralatan dan Mesin TA 2021*

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan
3020102003	Station Wagon	Rp 398.300.000
3070101171	Thermometer Gun	Rp 31.350.000
Total		Rp 429.650.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa reklasifikasi keluar, terdiri atas

Tabel Mutasi Reklasifikasi Keluar

Peralatan dan Mesin TA 2021

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan
3020102003	Minibus (Penumpang 14 orang)	Rp 398.300.000
3070101146	Thermometer Mercury untuk Suhu Badan	Rp 31.350.000
Total		Rp 429.650.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa BMN yang dihentikan penggunaannya karena kondisi rusak berat, terdiri atas

Tabel Mutasi BMN yang Dihentikan Penggunaannya

Peralatan dan Mesin TA 2021

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah Barang	Nominal
3.01.03.04	Transportable Generating Set	1	Rp9.466.000
3.05.01.03	Mesin Fotocopy Folio)	1	Rp80.000.000
3.05.01.04	Lemari Besi/Metal	1	Rp2.500.000
3.05.01.04	Rak Besi	4	Rp5.000.000
3.05.01.04	Filing Cabinet Besi	1	Rp1.500.000
3.05.01.04	Brandkas	2	Rp7.950.800
3.05.01.05	CCTV	1	Rp20.000.000
3.05.01.05	White Board	1	Rp750.000
3.05.01.05	LCD Projector/Infocus	6	Rp60.649.999
3.05.01.05	Focusing Screen/Layar LCD Projector)	2	Rp2.590.000
3.05.02.01	Meja Kerja Besi/Metal	4	Rp7.870.000
3.05.02.01	Meja Kerja Kayu	29	Rp68.780.000
3.05.02.01	Kursi Besi/Metal	89	Rp86.467.000
3.05.02.03	Mesin Penghisap Debu/vacuum cleaner	1	Rp3.500.000
3.05.02.04	A.C Split	10	Rp29.880.000
3.05.02.06	Televisi	1	Rp3.500.000
3.05.02.06	Camera Video	1	Rp14.850.000
3.05.02.06	Gordyin/kray	1	Rp16.720.000

3.05.02.06	Bendera Negara	1	Rp495.000
3.06.01.01	Uninterruptible Power Supply (ups)	6	Rp12.870.000
3.06.01.01	Digital Led Running Text	1	Rp14.650.000
3.06.01.04	Mesin Barcode	1	Rp5.000.000
3.06.02.01	Pesawat Telephone	1	Rp1.884.300
3.10.01.02	P.C Unit	16	Rp112.256.400
3.10.01.02	Lap Top	10	Rp94.025.441
3.10.02.03	Printer / peralatan personal komputer	73	Rp104.678.000
3.10.02.03	Scanner / peralatan personal komputer	5	Rp45.669.000
3.10.02.04	Router	1	Rp2.475.000
3.10.02.04	Repeater And Transciever	1	Rp2.500.000
Total		271	Rp818.476.940

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp 30.500.000

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp30.500.000 dan Rp30.500.000. Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut

Uraian	Nominal
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Rp 22.500.000
Instalasi Lain-lain	Rp 8.000.000
Total	Rp 30.500.000

Instalasi Lain-Lain merupakan Aset berupa instalasi jaringan internet yang perolehannya berasal dari transfer masuk dari pusat.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2021	30.500.000
Mutasi Tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2021	30.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(11.152.084)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	19.347.916

Aset Tetap

Lainnya

Rp199.033.900

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp199.033.900 dan Rp199.033.900. Aset tetap lainnya ini merupakan renovasi atas gedung kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebagaimana rincian berikut

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2021	199.033.900
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2021	199.033.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	199.033.900

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp6.818.048.332

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp6.818.048.332 dan Rp6.068.655.489. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.418.757.637	6.806.896.248	2.676.361.376
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.500.000	11.152.084	19.347.916
3	Aset Tetap Lainnya	199.033.900	0	199.033.900
Total		9.648.291.537	6.818.048.332	2.830.243.205

*Aset Tak
Berwujud
Rp328.919.000*

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp328.919.000 dan Rp383.244.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, pengembangan *website* serta pembelian *website* dengan rincian sebagai berikut

a. Pengembangan website, terdiri dari

No	Bawaslu	Nominal	Website
1	Provinsi Kalimantan Timur	26.450.000	kaltim.bawaslu.go.id
2	Kota Balikpapan	17.700.000	balikpapan.bawaslu.go.id
3	Kab. Berau	17.700.000	berau.bawaslu.go.id
4	Kota Bontang	19.459.000	bontang.bawaslu.go.id
5	Kab. Kutai Barat	19.360.000	kubar.bawaslu.go.id
6	Kab. Kutai Kartanegara	17.850.000	kukar.bawaslu.go.id
7	Kab. Mahakam Ulu	19.580.000	mahulu.bawaslu.go.id
8	Kab. Penajam Paser Utara	17.700.000	ppu.bawaslu.go.id
9	Kota Samarinda	19.580.000	samarinda.bawaslu.go.id
Total		175.379.000	

b. Pembelian website, terdiri dari

No	Bawaslu	Nominal	Website
1	Kab. Kutai Timur	19.690.000	kutim.bawaslu.go.id
2	Kab. Paser	17.750.000	paser.bawaslu.go.id
Total		37.440.000	

c. Software komputer

No	Uraian	Nominal
1	Software	54.325.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2021	383.244.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(54.325.000)
Saldo Per 31 Desember 2021	328.919.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(181.720.002)
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	147.198.998

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa BMN yang dihentikan penggunaannya karena kondisi rusak berat, terdiri atas

*Tabel Mutasi BMN yang Dihentikan Penggunaannya
Peralatan dan Mesin TA 2021*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah Barang
8.01.01.01	Software Komputer	2
Total		2

*Aset Lain-lain
Rp872.801.940*

C.12 Aset lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing masing sebesar Rp872.801.940 dan Rp429.869.509. Aset lain-lain ini terdiri dari

Keterangan	31 Des 2021	31 Des 2020
Aset Lain-Lain	Rp0	Rp429.869.509
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp818.476.940	Rp0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp54.325.000	Rp0
Total	Rp872.801.940	Rp429.869.509

Mutasi transaksi terhadap Aset lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo per 01 Januari 2021	429.869.509
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	872.801.940
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik atas Setoran atau Tindak Lanjut Pengembalian Aset Lain-Lain	(13.500.000)
Jurnal Balik dari Aset Lain-Lain ke tagihan tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	(416.369.509)
Saldo per 31 Desember 2021	872.801.940

Mutasi tambah Aset Lain-Lain berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dengan rincian sebagai berikut

Tabel Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah Barang	Nominal
3.01.03.04	Transportable Generating Set	1	Rp9.466.000
3.05.01.03	Mesin Fotocopy Folio)	1	Rp80.000.000
3.05.01.04	Lemari Besi/Metal	1	Rp2.500.000
3.05.01.04	Rak Besi	4	Rp5.000.000
3.05.01.04	Filing Cabinet Besi	1	Rp1.500.000
3.05.01.04	Brandkas	2	Rp7.950.800
3.05.01.05	CCTV	1	Rp20.000.000
3.05.01.05	White Board	1	Rp750.000
3.05.01.05	LCD Projector/Infocus	6	Rp60.649.999
3.05.01.05	Focusing Screen/Layar LCD Projector)	2	Rp2.590.000
3.05.02.01	Meja Kerja Besi/Metal	4	Rp7.870.000
3.05.02.01	Meja Kerja Kayu	29	Rp68.780.000
3.05.02.01	Kursi Besi/Metal	89	Rp86.467.000
3.05.02.03	Mesin Penghisap Debu/vacuum cleaner	1	Rp3.500.000
3.05.02.04	A.C Split	10	Rp29.880.000
3.05.02.06	Televisi	1	Rp3.500.000
3.05.02.06	Camera Video	1	Rp14.850.000
3.05.02.06	Gordyin/kray	1	Rp16.720.000
3.05.02.06	Bendera Negara	1	Rp495.000
3.06.01.01	Uninterruptible Power Supply (ups)	6	Rp12.870.000

3.06.01.01	Digital Led Running Text	1	Rp14.650.000
3.06.01.04	Mesin Barcode	1	Rp5.000.000
3.06.02.01	Pesawat Telephone	1	Rp1.884.300
3.10.01.02	P.C Unit	16	Rp112.256.400
3.10.01.02	Lap Top	10	Rp94.025.441
3.10.02.03	Printer / peralatan personal komputer	73	Rp104.678.000
3.10.02.03	Scanner / peralatan personal komputer	5	Rp45.669.000
3.10.02.04	Router	1	Rp2.475.000
3.10.02.04	Repeater And Transciever	1	Rp2.500.000
8.01.01.01	Software Komputer	2	Rp54.325.000
Total		271	Rp872.801.940

Mutasi kurang Aset Lain-Lain berupa Jurnal Balik atas Setoran atau Tindak Lanjut Pengembalian Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	NTPN / No. STS	Tanggal	Jumlah
1	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	20-Dec-19	Rp2.000.000
2	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	25-May-21	Rp5.000.000
3	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	10-Sep-21	Rp2.500.000
4	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	25-Oct-21	Rp1.500.000
5	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	23-Nov-21	Rp2.500.000
Total				Rp13.500.000

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp995.072.400*

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp995.072.400 dan Rp127.837.917. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
Software	Rp328.919.000	Rp181.720.002	Rp147.198.998
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp818.476.940	Rp759.027.398	Rp59.449.542
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp54.325.000	Rp54.325.000	Rp0
Total	Rp1.201.720.940	Rp995.072.400	Rp206.648.540

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp19.886.384*

C.14 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember` 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp19.886.384 dan Rp727.008.210. Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp3.157.186	Rp0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp16.729.198	Rp631.247.315
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp0	Rp95.760.895
Total	Rp19.886.384	Rp727.008.210

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut

No	Uraian	Sumber Dana	Nominal
1	Kekurangan Gaji PNS Bulan Desember 2021	APBN	Rp3.157.186
2	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Balikpapan	APBN	Rp181.154
3	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu kab.Berau	APBN	Rp279.800
4	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu kab. Kutai Timur	APBN	Rp287.300
5	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu kab.Kutai Timur	APBN	Rp522.000
6	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Samarinda	APBN	Rp1.282.591
7	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab.Kutai Kartanegara	APBN	Rp81.550
8	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab.Kutai Kartanegara	APBN	Rp1.408.443

9	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Bontang	APBN	Rp2.404.945
10	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Bontang	APBN	Rp126.250
11	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	APBN	Rp1.781.181
12	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	APBN	Rp5.629.104
13	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Paser	APBN	Rp108.480
14	Tagihan air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	APBN	Rp2.636.400
	Total		Rp37.136.3681

Utang Jangka Pendek Lainnya C.15 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp37.399.105. Adapun perbandingan nilai utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut

Keterangan	31 Des 2021	31 Des 2020
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 0	Rp 37.399.105

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 merupakan nilai pajak belum setor yang berasal dari anggaran hibah TA 2020 dan telah disetor seluruhnya dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Nominal	Tanggal Setor
1	Pajak belum disetor dari Anggaran Hibah TA 2020 oleh Bawaslu Berau	Rp 5.297.968	04-Jan-21

2	Pajak belum disetor dari Anggaran Hibah TA 2020 oleh Bawaslu Samarinda	Rp 181.364	06-Jan-21
3	Pajak belum disetor dari Anggaran Hibah TA 2020 oleh Bawaslu Mahakam Ulu	Rp26.626.542	24-Mar-21
4	Pajak belum disetor dari Anggaran Hibah TA 2020 oleh Bawaslu Balikpapan	Rp 5.293.231	27-Jan-21

Ekuitas

Rp3.672.742.759

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.672.742.759 dan Rp22.792.453.400. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp3.692.629.143 dan kewajiban sebesar Rp19.886.384. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp1

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1 dan Rp14.814.707. Pendapatan tersebut terdiri dari

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis Pendapatan	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Jasa Giro	1	14.814.707	(99.99)
Jumlah	1	14.814.707	(99.99)

Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1 merupakan selisih antara jurnal penyesuaian jasa giro rekening PDHL Bawaslu Kota Samarinda TA 2020 yang belum disetor sebesar Rp1.883.264 dengan penyetoran jasa giro rekening PDHL Bawaslu Kota Samarinda TA 2020 sebesar Rp1.883.265.

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021. Hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut

Mutasi Tambah	
Pendapatan Jasa Lembaga Giro (LRA)	14.716.504
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-
Jumlah Mutasi Tambah	14.716.504
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik atas Penyetoran Pendapatan Jasa Lembaga Giro TAYL	14.716.503
Jumlah Mutasi Kurang	14.716.503
Jumlah Pendapatan Per 31 Des 2021	1

*Beban Pegawai**Rp8.008.955.983***D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.008.955.983 dan Rp7.688.384.986. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan Beban Pegawai sebesar 4.17% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kenaikan signifikan terdapat pada beban tunjangan suami/istri PNS sebesar 156.81% karena adanya penambahan pembayaran tunjangan suami/istri untuk 3 (tiga) orang PNS Bawaslu Provinsi. Kenaikan juga terdapat pada beban gaji pokok PNS sebesar 60.42% yang disebabkan oleh berpindahannya status kepegawaian Kepala Bagian sejumlah 2 (dua) orang menjadi PNS Organik Bawaslu, sehingga gaji pokok mulai dibayarkan di Bawaslu Kalimantan Timur per Maret 2021.

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	492.794.746	307.179.240	60.42
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.103	4.185	93.62
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	32.271.056	13.303.152	142.58
Beban Tunj. Anak PNS	6.492.068	3.894.590	66.69
Beban Tunj. Struktural PNS	80.490.000	72.200.250	11.48
Beban Tunj. PPh PNS	39.053.284	44.382.163	(12.01)
Beban Tunj. Beras PNS	26.505.720	14.484.000	83
Beban Uang Makan PNS	159.717.250	112.307.000	42.21
Beban Tunjangan Umum PNS	23.480.000	20.510.000	14.48
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	6.384.179.100	6.360.462.600	0.37
Beban Uang Lembur	61.495.000	89.506.000	31.29
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	702.469.656	650.151.806	8.05
Jumlah Beban Kotor	8.008.955.983	7.688.384.986	4.17

Terdapat perbedaan Beban Pegawai pada LO dengan LRA per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut

Mutasi tambah	
Belanja Pegawai (LRA)	Rp8.005.798.797
Tunggakan Gaji pokok untuk Bulan Desember 2021	Rp3.157.186
Jumlah Mutasi tambah	Rp8.008.995.983
Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp0
Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2021	Rp.8.008.995.797

Beban Persediaan
Rp31.161.925

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp31.161.925 dan Rp126.482.850. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 75.36%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penggunaan persediaan barang berupa rapid tes dari Bawaslu Kota Bontang, Bawaslu Kota Samarinda dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	21.818.925	126.482.850	(82.75)
Beban Persediaan Lainnya	9.343.000	-	100
Jumlah	31.161.925	126.482.850	(75.36)

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang persediaan dibandingkan jumlah beban persediaan per 31 Desember 2021. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut

Saldo Awal	
Mutasi Tambah	
Barang Konsumsi	7.662.700
Persediaan Lainnya	-
Belanja Barang Persediaan – Barang Konsumsi	29.733.975
Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid 19	11.715.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Jumlah Mutasi Tambah	49.111.675
Mutasi Kurang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	-
Sisa Persediaan Per 31 Desember 2021	
Barang Konsumsi	15.577.750
Persediaan Lainnya	2.372.000
Jumlah Mutasi Kurang	17.949.750
Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2021	31.161.925

*Beban Barang
dan Jasa
Rp18.918.607.482*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.918.607.482 dan Rp76.768.456.632. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 terjadi penurunan Beban Barang dan Jasa sebesar 75.36% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penurunan yang signifikan terdapat pada beban jasa penanganan pandemi covid-19 sebesar 96.90% dan beban honor output kegiatan sebesar 96.84%. Penurunan beban-beban tersebut

disebabkan oleh berakhirnya penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2020 untuk Tahun Anggaran 2021 di mana telah dilakukan *cut-off* per 31 Maret 2021.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	12.918.181.393	39.962.977.390	(67.67)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	851.050	1.401.600	(39.28)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	639.674.000	1.152.875.000	(44.51)
Beban Barang Operasional Lainnya	227.736.955	1.405.281.018	(83.79)
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19	253.712.000	3.464.447.486	(92.68)
Beban Bahan	676.837.166	8.880.332.348	(92.38)
Beban Honor Output Kegiatan	155.840.000	4.926.490.000	(96.84)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.261.000	79.852.300	(62.10)
Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19	16.200.000	267.635.000	(93.95)
Beban Langganan Listrik	355.495.159	664.505.186	(46.50)
Beban Langganan Telepon	41.767.177	315.187.092	(86.75)
Beban Langganan Air	110.094.069	222.021.208	(50.41)
Beban Jasa Konsultan	-	55.582.000	(100)
Beban Sewa	3.358.920.000	12.826.582.184	(73.81)
Beban Jasa Profesi	42.950.000	667.750.000	(93.57)
Beban Jasa Lainnya	16.750.000	301.273.220	(94.44)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19	48.750.000	1.571.377.600	(96.90)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	24.587.513	2.886.000	751.96
Jumlah	18.918.607.482	76.768.456.632	(75.36)

Dari jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp18.918.607.482 terdapat jumlah beban barang dan jasa yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp318.662.000 yang dipergunakan untuk

1. Pembayaran lisensi video conference Januari s.d. Desember 2021;
2. Biaya paket data komunikasi Januari s.d. Desember 2021;

3. Penyemprotan disinfektan oleh Pihak Ketiga Januari s.d. Desember 2021.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2021. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut

Mutasi Tambah	
Belanja barang dan jasa	19.275.451.144
Belanja barang dan jasa yang masih harus dibayar	16.729.198
Beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin	24.587.513
Beban sewa per 31 Des 2021 dari Belanja sewa tahun yang lalu	159.000.000
Jumlah Mutasi Tambah	19.475.767.855
Mutasi Kurang	
Belanja barang yang dibayar di muka (Prepaid)	159.000.000
Jurnal balik atas beban tahun yang lalu	398.160.373
Jumlah Mutasi Kurang	557.160.373
Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Des 2021	18.918.607.482

*Beban
Pemeliharaan
Rp849.492.250*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp849.492.250 dan Rp1.959.981.885. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Per 31 Desember 2021 terdapat penurunan Beban Pemeliharaan sebesar 56.66% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penurunan yang signifikan terdapat pada beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 57.54% yang disebabkan oleh berkurangnya anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan

Timur sepanjang tahun 2021. Rincian beban pemeliharaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	163.885.000	385.999.623	(57.54)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	685.607.250	1.573.982.262	(56.44)
Jumlah	849.492.250	1.959.981.885	(56.66)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp9.541.318.148*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.541.318.148 dan Rp40.476.594.413. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020, Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 76.43%. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi perjalanan dinas atas penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2020 Tahun Anggaran 2021 di mana telah dilakukan *cut-off* per 31 Maret 2021. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	7.597.494.499	18.333.094.157	(58.56)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	470.707.997	8.376.061.256	(94.38)

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	532.030.000	12.777.459.000	(95.84)
Beban Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19	-	13.500.000	(100)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	941.085.652	976.480.000	(3.62)
Jumlah	9.541.318.148	40.476.594.413	(76.43)

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja perjalanan dinas dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2021. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut

Mutasi Tambah:	
Belanja perjalanan dinas	Rp9.774.405.090
Jumlah Mutasi Tambah	Rp9.774.405.090
Mutasi Kurang:	
Jurnal Balik atas Pembayaran Tunggal	Rp233.086.942
Jumlah Mutasi Kurang	Rp233.086.942
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Des 2021	Rp9.541.318.148

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.604.241.465*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.604.241.465 dan Rp1.703.117.299. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.462.661.324	1.633.139.798	(10.44)
Beban Penyusutan Jaringan	1.095.833	1.095.834	-
Jumlah Penyusutan	1.463.299.268	1.631.306.682	(10.30)
Beban Amortisasi Software	97.125.835	68.881.667	41
Jumlah Amortisasi	97.125.835	68.881.667	41
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	43.358.473	-	100
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	1.604.241.465	1.703.117.299	(5.80)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp2.081.848*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak tertagih Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.081.848. Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih adalah Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp217.080.052*

D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar

Rp217.080.052 dan Rp97.698.276. Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 0	Rp 1.816.720	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 217.080.052	Rp 146.161.466	48.52
Jumlah Pendapatan	Rp 217.080.052	Rp147.978.186	46.70
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 0	Rp 50.279.910	(100)
Jumlah Beban	Rp 0	Rp 50.279.910	(100)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp 217.080.052	Rp 97.698.276	122.19

Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp217.080.052 yang terdiri dari

- a. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp143.273.552 dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Supervisi Penanganan Pelanggaran pada tahapan rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Kutai Timur	14/01/2021	8ACC948VUIFON6B0	Rp430.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka memfasilitasi Koordiv Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kaltim a.n. Sukri	14/01/2021	FAE927QLTSPAB7KM	Rp200.000

Kelebihan Pembayaran Perjadin Supervisi Evaluasi dan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa serta Dinamika a.n. Hari Dermanto	14/01/2021	DF70F48VUIFONBT4	Rp300.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Mendampingi Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kaltim a.n. Syaugi Pratama	14/01/2021	EC5510N9V8673D76	Rp300.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin Rakor Nasional Tim Pemeriksa Daerah dan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta a.n. Hari Dermanto	14/01/2021	1497A1JNF2OJGG7P	Rp600
Kelebihan Pembayaran Perjadin Monitoring Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan di Berau a.n. Arrohman	01/02/2021	896828N3DNC68LU9	Rp168.000
Refund Tiket Pesawat Pulang Undangan Bawaslu RI pada Rakor Nasional Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Malang	10/03/2021	7B0AB2G4UTGS3MM6	Rp1.076.419
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kutai Kartanegara	27/04/2021	B148C2G4UTKAQID6	Rp4.179.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Kutai Timur	27/04/2021	01D583CIEO6N7P63	Rp1.425.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Balikpapan	28/04/2021	695A48N3DNL1LO2L	Rp1.995.000

Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Kutai Barat	29/04/2021	EA0482G4UTKCTND0	Rp5.282.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Paser	29/04/2021	75BC80N9V8FK5FR6	Rp18.995.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Bontang	29/04/2021	2D25A0N9V8FJ1J86	Rp3.942.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Samarinda	29/04/2021	073476U8E2GB1LBN	Rp2.015.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Mahakam Ulu	30/04/2021	CE14E1JNF321MVPG	Rp30.000.000
Pengembalian Honorarium Pokja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Kota Balikpapan TA 2020	30/04/2021	A918C7QLTT2ND1VC	Rp34.800.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Berau	30/04/2021	5D5D72G4UTKD0J32	Rp23.302.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Mahakam Ulu	20/05/2021	A16232G4UTN3KH03	Rp7.150.000
Pengembalian atas terdapatnya biaya taksi Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan metode At Cost namun dibayarkan menggunakan daftar	17/09/2021	6AF9C8N3DO3J4J5F	4.233.000

Pengeluaran riil tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada Bawaslu Kota Balikpapan			
Pengembalian kelebihan atas pembayaran Perjalanan Dinas yang terdiri dari kelebihan Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi pada Bawaslu Kota Balikpapan	14/09/2021	U8E2UQAH5B4FBD26	978.533
Pengembalian Tahap 1 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Kabupaten Paser	30/12/2021	FCF131JNF3PSKTN9	2.500.000
Total			Rp143.273.552

b. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp73.806.500. dengan rincian sebagai berikut

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan	Keterangan
3.05.02.01	Sice	Rp15.000.000	Reward Bank Muamalat untuk Bawaslu Kutai Timur
3.05.02.04	Kipas Angin	Rp5.295.000	
3.05.02.06	Televisi	Rp7.000.000	
3.10.01.02	PC Unit	Rp10.000.000	
3.10.02.03	Printer	Rp4.000.000	
3.05.01.05	Papan Pengumuman	Rp5.500.000	
3.05.02.06	Neon Box	Rp2.750.000	
3.06.01.02	Camera Conference	Rp3.250.000	
3.05.01.04	Lemari Besi / Metal	Rp11.424.000	
3.05.01.05	Whiteboard	Rp2.001.000	
3.10.02.03	Printer (ekstrakomptabel)	Rp2.769.000	
3.05.02.06	Dispenser	Rp2.932.500	
3.10.02.03	External / Portable Hardisk	Rp1.885.000	
Total		Rp73.806.500	

Pos Luar Biasa

D.10 Pos Luar Biasa

Rp0

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO

D.11 SURPLUS (DEFISIT) LO

Rp38.738.779.048

Defisit LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp38.738.779.048 dan Rp128.610.505.082.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp22.792.453.400

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 masing-masing sebesar Rp22.792.453.400 dan Rp17.786.811.349.

Defisit LO

Rp38.738.779.048

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.738.779.048 dan Rp128.610.505.082 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah /

Mengurangi Ekuitas

Rp8.730.755.730

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.730.755.730 dan Rp0 yaitu sebagai berikut

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

Rp12.385.861

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.385.861 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengkoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi.

Koreksi Lain Lain

Rp8.718.369.869

E.3.2 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.718.369.869 dan Rp0. Koreksi lain-lain tersebut

merupakan pengembalian dana hibah ke kas daerah dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kota Samarinda TA 2015 sebesar Rp13.500.000 dari total keseluruhan senilai Rp. 448.469.509. dan pengesahan dana hibah tahun 2020 sebesar Rp8.704.869.869 dengan rincian sebagai berikut.

Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi / Kabupaten / Kota)	Nominal	Tanggal Dokumen
Bawaslu Kab. Paser	Rp 1.256.852.702	29-Juli-21
Bawaslu Kota Samarinda	Rp 1.794.501.706	29-Juli-21
Bawaslu Kota Bontang	Rp 612.136.950	29-Juli-21
Bawaslu Kab. Berau	Rp 386.645.916	29-Juli-21
Bawaslu Kota Balikpapan	Rp 1.110.653.962	30-Juli-21
Bawaslu Kab. Kutai Timur	Rp 1.483.593.243	30-Juli-21
Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	Rp 1.754.174.880	30-Juli-21
Bawaslu Kab. Kutai Barat	Rp 282.869.292	30-Juli-21
Bawaslu Kab. Mahulu	Rp 23.441.218	30-Agustus-21
Total	Rp 8.704.869.869	

*Transaksi Antar
Entitas
Rp28.349.824.137*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp28.349.824.137 dan Rp157.990.056 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	28.507.814.193
Diterima dari Entitas Lain	(157.990.056)
Jumlah	28.349.824.137

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021. DDEL sebesar Rp157.990.056 sedangkan DKEL sebesar Rp28.507.814.193

DDEL sebesar Rp157.990.056 ini terdiri dari

Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain	Jumlah
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Rp 14.716.504
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 143.273.552
Total	Rp157.990.056

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) terdiri dari

Uraian	NTPN	Nominal
Jasa giro APBN Bawaslu Kota Samarinda Agustus-September 2020	1150A61QU7K95F28	Rp 19.591
Jasa giro APBN Bawaslu Kab Berau Agustus-September 2020	782C06U8E26RQC3J	Rp 4.225
Jasa giro APBN Bawaslu Kab Mahakam Ulu Agustus 2020	96CD32G4UTATPAPI	Rp 478

Jasa giro Rekening PDHL Bawaslu Kota Samarinda TA 2020	418046U8E2DDU8HF	Rp 1.883.265
Jasa giro Rekening PDHL Bawaslu Kota Balikpapan TA 2020	8C0580N9V8FK50LI	Rp 5.108.714
Jasa Giro Rekening PDHL Bawaslu Kab. Mahakam Ulu T.A 2020	512A23CIE0FM19SO	Rp 7.700.231
Total		Rp14.716.504

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu terdiri dari

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal
Kelebihan Pembayaran Perjadiin dalam rangka Supervisi Penanganan Pelanggaran pada tahapan rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Kutai Timur	14/01/2021	8ACC948VUIFON6B0	Rp430.000
Kelebihan Pembayaran Perjadiin dalam rangka memfasilitasi Koordiv Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kaltim a.n. Sukri	14/01/2021	FAE927QLTSPAB7KM	Rp200.000
Kelebihan Pembayaran Perjadiin Supervisi Evaluasi dan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa serta Dinamika a.n. Hari Dermanto	14/01/2021	DF70F48VUIFONBT4	Rp300.000
Kelebihan Pembayaran Perjadiin dalam rangka Mendampingi Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kaltim a.n. Syaugi Pratama	14/01/2021	EC5510N9V8673D76	Rp300.000

Kelebihan Pembayaran Perjadin Rakor Nasional Tim Pemeriksa Daerah dan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta a.n. Hari Dermanto	14/01/2021	1497A1JNF2OJGG7P	Rp600
Kelebihan Pembayaran Perjadin Monitoring Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan di Berau a.n. Arrohman	01/02/2021	896828N3DNC68LU9	Rp168.000
Refund Tiket Pesawat Pulang Undangan Bawaslu RI pada Rakor Nasional Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Malang	10/03/2021	7B0AB2G4UTGS3MM6	Rp1.076.419
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kutai Kartanegara	27/04/2021	B148C2G4UTKAQID6	Rp4.179.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Kutai Timur	27/04/2021	01D583CIEO6N7P63	Rp1.425.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Balikpapan	28/04/2021	695A48N3DNL1LO2L	Rp1.995.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Kutai Barat	29/04/2021	EA0482G4UTKCTND0	Rp5.282.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Paser	29/04/2021	75BC80N9V8FK5FR6	Rp18.995.000

Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Bontang	29/04/2021	2D25A0N9V8FJ1J86	Rp3.942.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kota Samarinda	29/04/2021	073476U8E2GB1LBN	Rp2.015.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Mahakam Ulu	30/04/2021	CE14E1JNF321MVPG	Rp30.000.000
Pengembalian Honorarium Pokja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Kota Balikpapan TA 2020	30/04/2021	A918C7QLTT2ND1VC	Rp34.800.000
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Berau	30/04/2021	5D5D72G4UTKD0J32	Rp23.302.500
Pengembalian Honorarium Pokja yang melebihi Jumlah Maksimal Perbulan T.A 2020 pd Bawaslu Kab Mahakam Ulu	20/05/2021	A16232G4UTN3KH03	Rp7.150.000
Pengembalian atas Terdapatnya Biaya Taksi Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan Metode at cost namun dibayarkan menggunakan daftar pengeluaran riil tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban pada Bawaslu kota Balikpapan	17/09/2021	6AF9C8N3DO3J4J5F	Rp4.233.000
Pengembalian atas Kelebihan atas Pembayaran Perjalanan Dinas yang terdiri dari kelebihan biaya Penginapan dan biaya Transportasi	14/09/2021	U8E2UQAH5B4FBD26	Rp978.533

Pengembalian Tahap I Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP Ke Bawaslu Kabupaten Paser	30/12/2021	FCF131JNF3PSKTN9	2.500.000
Total			Rp143.273.552

DKEL sebesar Rp28.507.814.193 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai	8.005.798.797
Belanja Barang	20.385.525.398
Belanja Modal	116.489.998
Jumlah	28.507.814.193

Penurunan

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Ekuitas

Rp19.119.710.641

Penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.119.710.641 dan Rp5.005.642.051

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Surplus / Defisit LO	(38.738.779.048)	(128.610.505.082)
Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	(8.730.755.730)	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(12.385.861)	-
Koreksi Lain-Lain	(8.718.369.869)	-
Jumlah	(47.469.534.778)	(128.610.505.082)
Transaksi Antar Entitas	28.349.824.137	133.616.147.133
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(19.119.710.641)	5.005.642.051

Ekuitas Akhir

Rp3.672.742.759

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.672.742.759 dan Rp22.792.453.400.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp22.792.453.400 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp19.119.710.641.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Provinsi Kelas B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian dan kelompok jabatan fungsional.

Sepanjang Tahun 2021, telah dilantik Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Nomor SK
1	Mahrus Irhamdi	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda	1416/KP.04.00/SJ/04/2021
2	Toni Bowo Satoto,SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	2337.A/KP.04.00/SJ/07/2021
3	Dewi Hastuti	Kepala Subbagian Administasi pada Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda	3215/KP.04.00/SJ12/2021
4	Muhammad S.E., M.Si	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	3215/KP.04.00/SJ12/2021
5	Rusmini, SE	Kepala Sub bagian Administrasi dan PLt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	2420/KP.04.00/SJ/08/21

F.2 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 2 Januari 2020 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Satuan Kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Yusuf. S.Si.. M.A.

Sepanjang tahun 2021, telah terdapat beberapa pergantian pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut

No	Jabatan	Semula	Menjadi	Nomor SK	Tanggal SK
1	Staf Pengurus Barang Milik Negara	Andreas Kelan	Widya Damayanti. S.Mat	044/KU.01.00/KI/03/2021	1 Maret 2021
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Berau	Fitriyani	Raras Kusumo Bimo Broto. S.H.	086/KP.04.00/KI/05/2021	24 Mei 2021
3	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kab. Kutai Timur	Hairy Anshari. M.Si	Hernilawati. S.Hut	091/KP.04.00/KI/06/2021	2 Juni 2021
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Kutai Timur	Hernilawati. S.Hut	Bunga Warna. S.E.	094/KP.04.00/KI/06/2021	8 Juni 2021
5.	Bendahara Pengeluaran	Kiki Mulyana,A.Md	Tyagita Osa Ayuningtyas, S.ST	115/KU.01.00/KI/08/2021	2 Agustus 2021
6.	Pengelola Keuangan	Tyagita Osa Ayuningtyas,S,S	Regita, Destalia,S.Tr.AK	115/KU.01.00/KI/08/2021	2 Agustus 2021

F.3 Rekening yang Dikelola

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengelola rekening yang berasal dari 2 (dua) sumber anggaran, yaitu rupiah murni sebanyak 11 (sebelas) *virtual account* dan hibah dalam negeri sebanyak 9 (sembilan) rekening.

Per 31 Desember 2021, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penutupan rekening yang bersumber dari hibah dalam negeri yaitu Rekening Penerimaan Dana Hibah Langsung (PDHL) atas Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada TA 2020 sebagaimana terlampir

Uraian	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nomor Register	Tanggal Penutupan
Hibah Bawaslu Kota Balikpapan	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU	63001000730307	21WM6XTA	25 Juni 2021

Hibah Bawaslu Kabupaten Berau	Kaltimara	RPL046PDHL BAWASBRU 2N8Y5THA	0061510559	2N8Y5THA	19 April 2021
Hibah Bawaslu Kota Bontang	Kaltimara	RPL046PDHL BAWASBTG 2MX24GWA	0081424012	2MX24GWA	22 April 2021
Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU KUBAR UNTUK 2RRA7CP	626-01-000715- 30-8	2RRA7CP	27 April 2021
Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU KUKAR UNTUK 2ASS7PYA	21201002464300	2ASS7PYA	7 April 2021
Hibah Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Muamalat	RPL 046 PDHL BAWASLU KUTIM 28A4AN5A	6050012459	28A4AN5A	10 Mei 2021
Hibah Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	BRI	RPL 046 PDHL BAWASLU MAHULU UTK 2LLU4A9A	8003-01-000047- 30-7	2LLU4A9A	25 Juni 2021
Hibah Bawaslu Kabupaten Paser	Kaltimara	RPL046PDHL BAWASLUPSR 23CRIWEA	0021420387	23CRIWEA	30 April 2021
Hibah Bawaslu Kota Samarinda	Mandiri	RPL 046 PDHL BAWASLU SMD UNTUK 255CW6LA	148-00-1704930-8	255CW6LA	26 April 2021

Sehingga rekening yang masih aktif dikelola per 31 Desember 2021 adalah *virtual account* yang bersumber dari angkaan Rupiah Murni, dengan rincian terlampir

Uraian	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
RM Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Mandiri	BPG 046 BAWASLU PROV KALTIM	810012684171000
RM Bawaslu Kabupaten Berau	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KAB BERAU	810012684171002

RM Bawaslu Kabupaten Bontang	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BONTANG	8100126864171003
RM Bawaslu Koabupaten Kubar	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUBAR	8100126864171004
RM Bawaslu Kutai Kartanegara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUKAR	8100126664171005
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUTIM	8100126864171006
RM Bawaslu Kabupaten Mahulu	Mandiri	BP 046 BAWASLU KB MAHULU	8100126864171007
RM Bawaslu Kabupaten Paser	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB MAHULU	8100126864171008
RM Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BALIKPAPAN	8100126864171001
RM Bawaslu Kota PPU	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PPU	8100126864171009
RM Bawaslu Kota Samarinda	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT SAMARINDA	8100126864171010

F.4 Pengungkapan Lainnya

a. Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada TA 2015

Pada tanggal 25 Mei 2021, telah dilaksanakan pertemuan antara perwakilan Inspektorat Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia dengan Ibu Meity Landemeyke Torar selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kota Samarinda TA 2015 terkait pengembalian sisa dana hibah Pilkada TA 2015 tidak sesuai ketentuan. Pada pertemuan tersebut, Ibu Meity bersedia untuk menyetorkan kekurangan Penyetoran Sisa Dana Hibah Pilkada ke Kas Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hal ini telah diserahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 00527 yang terletak di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara atas nama Pemegang Hak Alexander Agustinus Rottie (tanggal lahir 2 Agustus 1972) dengan luas 7.321 m² (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) bukti copy terlampir.

b. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020

Berdasarkan konsep hasil pemeriksaan BPK RI atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, terdapat temuan berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bawaslu Kota Balikpapan belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp933.495.892. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal supaya menginstruksikan Inspektur Utama Bawaslu untuk melakukan reviu keabsahan bukti pertanggungjawaban belanja Bawaslu Kota Balikpapan.

F.5 Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak ada temuan, baik kelemahan/n material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif, sebagaimana terlampir pada lampiran. – (Laporan yang bertandatangan).

**MONITORING POSISI KAS (RUPIAH MURNI)
PER 31 DESEMBER 2021**

KODE SATKER : 686417
NAMA SATKER : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

No	BP/BPP	Saldo Rek Koran Bank (RM) 31 Desember 2021	Uang Tunai di Brankas 31 Desember 2021	Uang di BPP 31 Desember 2021	Jumlah Kas di BP/BPP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih
							Sisa LS yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor			
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BPP Bawaslu Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BPP Bawaslu Kabupaten Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BPP Bawaslu Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BPP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BPP Bawaslu Kabupaten Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BPP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPP Bawaslu Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Samarinda, 13 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A
NIP 19700527 199803 1 001

**MONITORING POSISI KAS (HIBAH)
PER 31 DESEMBER 2021**

KODE SATKER : 686417
NAMA SATKER : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

No	BP/BPP	Saldo Rek Koran Bank (RM) 31 Desember 2021	Uang Tunai di Brankas 31 Desember 2021	Uang di BPP 31 Desember 2021	Jumlah Kas di BP/BPP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih
							Sisa LS yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor			
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BPP Bawaslu Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BPP Bawaslu Kabupaten Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BPP Bawaslu Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BPP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BPP Bawaslu Kabupaten Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BPP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPP Bawaslu Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Samarinda, 13 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A
NIP 19700527 199803 1 001

**REKAP BELANJA SEWA DIBAYAR DI MUKA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE SATKER : 686417
NAMA SATKER : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	NAMA SEWA	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU SEWA (Bulan)	PERIODE		TANGGAL BAYAR	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)	PERHITUNGAN BEBAN SEWA PER		SEWA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DES 2021	KET
						MULAI	BERAKHIR			JANGKA WAKTU DILALUI (BULAN)	NILAI		
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M = K/G*L	N=K-M	
1	Bawaslu Kota Balikpapan	Sewa Gedung Bawaslu Kota Balikpapan	PBJ.01.01/PPK/Adm/Bawaslu/SPK/06/2021	29 Juni 2021	12	10 Juli 2021	10 Juli 2022	30 Juni 2021	318.000.000,00	6	159.000.000	159.000.000	
2													
3													
4													
5													
JUMLAH									318.000.000				

Samarinda, 13 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



REKAPITULASI DANA HIBAH DAN PENCAIRAN BAWASLU

Update per 31 Desember 2021

KODE SATKER : 686417

NAMA SATKER : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

No	Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nomor Register	Pendonor	No.NPHD	Tgl.NPHD	Nilai NPHD	Saldo Awal Tahun 2021	Total Jumlah Uang Yang Diterima tahun 2021	SPHL Tahun 2021	Penyesuaian Beban (LO) Tahun 2021	Jumlah Realisasi Tahun 2021	SP3HL tahun 2021	Saldo 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13=11+12	14	15=8+9-13-14
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BPP Bawaslu Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BPP Bawaslu Kabupaten Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BPP Bawaslu Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BPP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BPP Bawaslu Kabupaten Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BPP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPP Bawaslu Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH						-	-	-	-	-	-	-	-

Samarinda, 13 Januari 2022
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A
 NIP 19700527 199803 1 001

REKAPITULASI HIBAH BARANG BAWASLU

Update per 31 Desember 2021

KODE SATKER : 686417
 NAMA SATKER : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

No	Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nomor Register	Pendonor	No. NPHD	Tgl. NPHD	Nilai NPHD	No. BAST	Tgl. BAST	Nilai BAST	No. MPHLBJS	Tgl. MPHLBJS	No. Persetujuan MPHLBJS	Tgl. Persetujuan MPHLBJS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BPP Bawaslu Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BPP Bawaslu Kabupaten Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BPP Bawaslu Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BPP Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BPP Bawaslu Kabupaten Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BPP Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPP Bawaslu Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH						-	-	-	-	-	-	-	-

Samarinda, 13 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A
 NIP 19700527 199803 1 001

**DAFTAR UTANG PIHAK KETIGA/TUNGGAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE SATKER : 686417

NAMA SATKER : Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

No	Penerima	Kode Akun	Untuk Pembayaran	Alasan Keterlambatan	Kontrak / Tagihan		Sumber Dana	Jumlah	
					Nomor	Tgl			
1	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Balikpapan				APBN	Rp	181.154
2	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Berau				APBN	Rp	279.800
3	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Kutai Timur				APBN	Rp	287.300
4	PLN	522111	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Kutai Timur				APBN	Rp	522.000
5	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Samarinda				APBN	Rp	1.282.591
6	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara				APBN	Rp	81.550
7	PLN	522111	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara				APBN	Rp	1.408.443
8	PLN	522111	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Bontang				APBN	Rp	2.404.945
9	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kota Bontang				APBN	Rp	126.250
10	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur				APBN	Rp	1.781.181
11	PLN	522111	Tagihan Listrik Bulan Desember 2021 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur				APBN	Rp	5.629.104
12	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Paser				APBN	Rp	108.480
13	PDAM	522113	Tagihan Air Bulan Desember 2021 Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara				APBN	Rp	2.636.400
14	Ridho Wirawan, dkk	511111	Kekurangan Gaji PNS Bulan Desember 2021				APBN	Rp	3.157.186
JUMLAH								Rp	19.886.384

Samarinda, 13 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Yusuf, S.Si., M.A

NIP. 19700527 199803 1 001

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

Samarinda, 11 Januari 2022

Ketua Tim



Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si

NIP. 19680828 199003 1 016

Lampiran

Laporan Hasil Penelitian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Peralatan dan Mesin
3. Tanah

B. Daftar Kelemahan Material dan atau Kelemahan Signifikan

No				Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
1.	Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah			